

**PERAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DALAM  
MENANGGULANGI *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED*  
*FISHING* DI INDONESIA**

Oleh:  
ANINDITA REZHA MAHARANI<sup>1</sup>, MARSUDI TRIATMODJO<sup>2</sup>

**INTISARI**

Sebagai negara maritim, salah satu isu utama perikanan di Indonesia adalah fenomena *illegal, unreported, dan unregulated fishing* (IUUF) yang marak dan merugikan. Oleh karena itu, penulisan hukum ini akan menganalisis IUUF di Indonesia secara mendalam serta peran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dalam menanganinya dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi regulasi tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif-Empiris, dengan melakukan studi literatur terhadap instrumen hukum, artikel jurnal, media massa, serta wawancara dengan berbagai pihak relevan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, praktik IUUF di Indonesia sangat kompleks, dengan berbagai penyebab dan dampak negatif yang menjadikannya isu yang harus terus ditangani dengan serius; kedua, meskipun PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur tidak secara langsung ditujukan untuk menangani IUUF, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki potensi untuk membantu mengurangi praktik IUUF. Dengan adanya perbaikan infrastruktur, peningkatan sosialisasi, dan pengawasan yang lebih ketat, PIT dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.

**Kata kunci:** IUUF (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing), Penangkapan Ikan Terukur, PP Nomor 11 Tahun 2023

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Internasional. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

***THE ROLE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 11 OF 2023  
ON MEASURED FISHING IN TACKLING ILLEGAL, UNREPORTED,  
AND UNREGULATED FISHING IN INDONESIA***

*Author:*

ANINDITA REZHA MAHARANI<sup>3</sup> AND MARSUDI TRIATMODJO<sup>4</sup>

***ABSTRACT***

*As a maritime country, one of the main issues of Indonesian fisheries is the rampant and harmful phenomenon of illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF). Therefore, this legal paper will analyze IUUF in Indonesia in depth as well as the role of Government Regulation No. 11 of 2023 on Measured Fishing in addressing it by considering various factors that influence the implementation of the regulation.*

*The method used in this research is the Normative-Empirical approach, by conducting a literature study of relevant legal instruments, journal articles, mass media, and interviews with relevant parties. This research also uses qualitative methods to analyze the compiled data.*

*The research findings suggest two main points. First, IUUF practices in Indonesia are very intricate, with various drivers and negative consequences that make it an issue that must be consistently addressed; second, although the Government Regulation No. 11 of 2023 on Measured Fishing is not directly aimed at addressing IUUF, this research shows that the policy has the potential to help reduce IUUF practices. With infrastructure enhancements, increased socialization, and stricter supervision, PIT can serve as a strategic instrument in the sustainable management of fisheries resources in Indonesia.*

***Keywords:*** *IUUF (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing), Measured Fishing, Government Regulation No. 11 of 2023*

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

<sup>4</sup> Dosen Departemen Hukum Internasional. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada